



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA KOMISI VIII DPR RI  
KE PROVINSI BALI**

**MASA PERSIDANGAN V 2021-2022  
10-12 JUNI 2022**



**SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI  
JAKARTA 2022**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Umum**

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR-RI dalam kunjungan Kerja Spesifik Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 telah membentuk Tim yakni ke Provinsi Bali.

### **B. Dasar Kunjungan Kerja**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, 21 dan 23 tentang tugas DPR-RI di bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.
2. Undang undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah dalam Undang undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Keputusan DPR RI Nomor 01 tahun 2014 tentang Tata Tertib:
  - a. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;
  - b. Pasal 58 Ayat (3) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan;
  - c. Pasal 59 Ayat (3) huruf (f) tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi DPR RI pada masa reses.
4. Keputusan rapat Internal Komisi VIII DPR RI

### **C. Maksud Dan Tujuan**

#### **1. Maksud.**

- a. Melakukan komunikasi intensif antara DPR RI khususnya Komisi VIII DPR RI dengan daerah, baik Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dibidang Kerukunan Umat Beragama.
- b. Melaksanakan fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. Menggali dan menyerap aspirasi daerah dari unsur Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

#### **2. Tujuan.**

Mendapatkan masukan berupa data faktual tentang pelaksanaan program pembangunan secara umum dan khusus bidang Kerukunan Umat beragama.

## BAB II

### HASIL KUNJUNGAN KERJA KE PROPVINSI BALI

#### A. Identifikasi Masalah

##### 1. Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a) Eksploitasi anak di sektor pariwisata menjadi perhatian Yayasan Alit dan Lentera Anak Bangsa.
- b) Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Provinsi Bali telah melakukan penelitian seputar kondisi dan permasalahan anak remaja yang dimulai sejak 2018. Khususnya, remaja dari 5 SMP Kota Denpasar yang menjadi sekolah percontohan.
- c) dalam bentuk Global Early Adolescent Study (GEAS) ini fokus pada persoalan gender, kesehatan mental, kedekatan dan harapan orangtua, kesehatan reproduksi serta *bullying*.

##### 2. Aspek Kerukunan Beragama

- a) Bali memang amat kental dengan agama Hindu. Namun, di sisi lain, keragaman agama di sana terasa amat damai. dapat membuktikan setiap umat manusia dapat hidup berdampingan dalam menjalankan ibadahnya masing-masing. Tempat ini membuktikan toleransi masyarakat Bali dalam hal agama masih sangat terjaga.
- b) Bali menduduki peringkat ketiga dalam indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) tahun 2019. Indeks KUB ini dirilis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Bali mendapat nilai 80,1 setelah Papua Barat (nilai 82,1) dan Nusa Tenggara Timur (nilai 81,1) yang masing-masing menempati peringkat pertama dan kedua.

##### 3. Aspek Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

- a) Penyandang disabilitas di Indonesia, khususnya di Provinsi Bali masih harus terus mendapat perhatian di tengah masyarakat dan perlu memastikan kepedulian dan tanggung jawab pemerintah terhadap penyandang disabilitas.
- b) Pentingnya peningkatan dalam memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan, keterampilan, resosialisasi, bimbingan lanjut bagi penyandang penyandang disabilitas agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

## **B. Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Pura Keramat Agung Pemecutan**

Tim Komisi VIII DPR RI mengunjungi Pura Keramat Agung Pemecutan, Denpasar sebagai salah satu contoh toleransi kerukunan antar umat beragama ( Hindu - Islam ) yg sudah terjalin selama ini di Bali.

Turut hadir mendampingi Wakil Walikota Denpasar I G N Jaya Negara, Lurah Pemecutan Ida Bagus Agung Upawana Manuaba,SE. Bendesa Adat Denpasar A A N Rai Sudarma,SH.,MH. Mangku Pura Keramat Agung Pemecutan Jro Mangku Made Puger serta tokoh Masyarakat.

## **C. Pura Langgar Di Bunutin: Bukti Sejarah Islam Permulaan di Bangli – Bali**

Pura Langgar berada di Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Rumah persembahyangan umat Hindu ini dikenal pula dengan nama Pura Dalem Jawa. Perlu waktu sekitar 15 menit melaju dengan kendaraan bermotor dari Kota Bangli ke arah selatan untuk sampai ke pura ini. Lokasinya di sisi Timur jalan raya, lantas memasuki sebuah gang sekitar 100 meter.

Pura yang dikelola Puri Bunutin ini memiliki sisi sejarah sangat panjang, yang konon ada kaitannya dengan Kerajaan Blambangan tempo dulu. Bahkan, leluhur kalangan Puri Agung Bunutin juga berasal dari trah Raja Blambangan, Jawa Timur.

## **BAB III**

### **REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil Tim kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Bali, disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Masih keterbatasan dukungan anggaran serta prasarana dalam mendukung peningkatan fungsi keagamaan, oleh karena itu Komisi VIII DPR RI memberikan dukungan agar segera dilakukan penguatan dukungan anggaran dari Kementerian Agama RI untuk pembinaan dan bimbingan kerukunan umat beragama, bantuan pemeliharaan sarana dan prasarana ibadah, dan kegiatan lain terkait fungsi keagamaan di Provinsi Bali.
2. Meningkatkan kegiatan forum komunikasi antar umat beragama secara periodik melalui kegiatan dialogis dan kegiatan social kemasyarakatan.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI**

**KETUA TIM**